

Determinasi Kegagalan Penyaluran Insentif pada Program Kartu Prakerja: Peran Jumlah Penerima Program dan Insentif

Novia Rahma Nuzula¹, Heny Handayani²

Politeknik STIA LAN Jakarta^{1,2}

nruzula7@gmail.com¹, henny.handayani@stialan.ac.id²

Abstract

The Pre-Employment Card Program is a government policy in improving the competence of the workforce while providing incentive assistance to the community. However, in its implementation, obstacles were still found in the form of failure to pay incentives. This study aims to analyze the influence of the number of program recipients and incentive recipients on the failure of incentive payments in the Pre-Employment Card Program in Indonesia for the 2020–2024 period. This study uses a quantitative approach with multiple linear regression analysis methods. The data used is secondary data for the 2020–2024 period. The results of the study showed that the number of program recipients and incentive recipients had a significant effect on the failure of incentive payments. These findings indicate that the larger the number of recipients, the greater the potential for payment failure, the greater the complexity of the system and administration. This research provides important implications for the government in increasing the effectiveness of the incentive distribution system.

Keywords: Pre-Employment Card, payment failure, public policy, incentives

Abstrak

Program Kartu Prakerja merupakan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja sekaligus memberikan bantuan insentif kepada masyarakat. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan kendala berupa kegagalan pembayaran insentif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah penerima program dan penerima insentif terhadap kegagalan pembayaran insentif pada Program Kartu Prakerja di Indonesia periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda. Data yang digunakan merupakan data sekunder periode 2020–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penerima program dan penerima insentif berpengaruh signifikan terhadap kegagalan pembayaran insentif. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin besar jumlah penerima, maka potensi kegagalan pembayaran juga meningkat akibat kompleksitas sistem dan administrasi. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas sistem penyaluran insentif.

Kata kunci: Kartu Prakerja, kegagalan pembayaran, kebijakan publik, insentif

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 yang melanda berbagai negara, termasuk Indonesia, telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor strategis, khususnya sektor ekonomi. Untuk mengendalikan laju penyebaran virus yang sangat cepat dan sulit diprediksi, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah sejak Maret 2020 (Taufiq & Akhmadi, 2022a). Meskipun kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat, implementasinya turut menimbulkan konsekuensi yang cukup besar terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar $-5,32\%$ pada triwulan kedua tahun 2020 (Setianto & Kurniawan, 2020).

Program Kartu Prakerja merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, khususnya bagi pencari kerja, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, serta pekerja yang

membutuhkan peningkatan keterampilan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2023). Program ini juga memberikan bantuan insentif kepada peserta sebagai bentuk dukungan ekonomi. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kartu prakerja tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dapat dilihat data target jumlah penerima program kartu prakerja sesuai Surat Keputusan Penetapan Penerima Kartu Prakerja dalam tabel berikut:

Tabel 1. Target Jumlah Penerima Program Kartu Prakerja

No.	Tahun Pelaksanaan Program	Jumlah Penerima
1.	2020	5.987.678
2.	2021	6.019.842
3.	2022	5.076.928
4.	2023	1.272.177
5.	2024	1.510.968

Sumber: Prakerja, 2020-2024b

Sejak diluncurkan, Program Kartu Prakerja telah menjangkau jutaan peserta di seluruh Indonesia. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, salah satunya adalah kegagalan pembayaran insentif kepada peserta. Permasalahan ini menjadi isu penting karena dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah (Grindle, 1980). Sementara itu, data jumlah penyaluran IMK (Insentif Mencari Kerja) pada Program Kartu Prakerja tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Jumlah Penerima IMK (Insentif Mencari Kerja) Program Kartu Prakerja

No.	Tahun Pelaksanaan Program	Jumlah Penerima
1.	2020	5.329.647
2.	2021	5.738.934
3.	2022	4.936.298
4.	2023	922.846
5.	2024	1.211.209

Sumber: Prakerja, 2020-2024b

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2020, program ini berhasil menyalurkan insentif kepada 5.329.647 peserta. Jumlah penerima meningkat pada tahun 2021, mencapai 5.738.934 orang, yang merupakan jumlah tertinggi sepanjang periode program ini. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan jumlah penerima menjadi 4.936.298 orang. Penurunan ini semakin tajam pada tahun 2023, di mana hanya 922.846 peserta yang menerima insentif. Meskipun demikian, pada tahun 2024, jumlah penerima kembali mengalami peningkatan menjadi 1.211.209 orang. Penurunan jumlah

penyaluran IMK juga sejalan dengan jumlah penurunan target penerima program yang dikarenakan oleh perubahan kebijakan pemerintah.

Kegagalan pembayaran insentif dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah meningkatnya jumlah penerima program dan jumlah penerima insentif yang berdampak pada kompleksitas pengelolaan sistem distribusi bantuan (Pressman & Wildavsky, 1984). Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kegagalan pembayaran.

KAJIAN LITERATUR

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan strategis yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan publik dan mencapai tujuan pembangunan tertentu. Menurut Dunn (2018), kebijakan publik tidak hanya terbatas pada tahap perumusan, tetapi juga mencakup implementasi dan evaluasi yang menentukan efektivitas suatu kebijakan. Dalam konteks ini, kebijakan publik berperan sebagai instrumen utama dalam mengelola sumber daya dan mengarahkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut, keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh proses implementasinya. Grindle (1980) menegaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*), termasuk kapasitas institusi, aktor yang terlibat, serta kompleksitas program. Studi terbaru menunjukkan bahwa kompleksitas kebijakan yang tinggi sering kali meningkatkan risiko kegagalan implementasi, terutama pada program berbasis teknologi dan berskala besar (Peters, Pierre, & Randma-Liiv, 2022).

Di era digital, implementasi kebijakan publik juga sangat bergantung pada kesiapan sistem teknologi informasi. Keterbatasan infrastruktur digital dan kualitas data dapat menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan berbasis elektronik (Mergel, Edelmann, & Haug, 2019). Jadi, efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh kesiapan sistem pendukungnya.

Program Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja merupakan kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berbasis digital sekaligus memberikan bantuan insentif kepada peserta. Program ini ditujukan bagi pencari kerja, pekerja terdampak PHK, serta pekerja yang membutuhkan peningkatan keterampilan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2023). Dalam perspektif kebijakan publik, Kartu Prakerja dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang menggabungkan pendekatan *active labor market policy* dan *social assistance*. Menurut Brown dan Koettl (2015), kebijakan pasar tenaga kerja aktif berperan penting dalam meningkatkan employability tenaga kerja melalui pelatihan dan insentif. Bahkan, selama pandemi COVID-19, Kartu Prakerja juga berfungsi sebagai bagian dari program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat (World Bank, 2022). Namun, implementasi program berbasis digital ini menghadapi tantangan dalam hal validitas data peserta, integrasi sistem, serta efektivitas penyaluran insentif. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa program bantuan sosial berbasis digital memiliki risiko kesalahan distribusi yang cukup tinggi apabila tidak didukung oleh sistem data yang akurat dan terintegrasi (OECD, 2023).

Kegagalan Pembayaran

Kegagalan pembayaran merupakan salah satu bentuk kegagalan implementasi kebijakan yang terjadi ketika bantuan atau insentif tidak dapat disalurkan kepada penerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mulyadi (2016) mendefinisikan kegagalan pembayaran sebagai kegagalan dalam proses distribusi dana yang disebabkan oleh kesalahan administratif, sistem, maupun faktor teknis lainnya. Dalam konteks program berbasis digital, kegagalan pembayaran sering kali berkaitan dengan kualitas data dan kompleksitas sistem pembayaran. Menurut Gelb dan Diofasi (2020), sistem pembayaran digital yang tidak didukung oleh basis data yang akurat dapat meningkatkan risiko kesalahan distribusi bantuan. Semakin besar jumlah penerima manfaat, semakin tinggi pula potensi terjadinya bottleneck dalam sistem distribusi (World Bank, 2022). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa kegagalan penyaluran bantuan sosial sering terjadi akibat kurangnya integrasi data antar lembaga serta keterbatasan kapasitas sistem dalam menangani volume transaksi yang besar (OECD, 2023). Maka pengelolaan data yang baik dan sistem pembayaran yang andal menjadi faktor kunci dalam meminimalkan kegagalan pembayaran.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teoritis dan empiris yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kompleksitas program dan skala penerima manfaat memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan, khususnya dalam hal penyaluran insentif. Jumlah penerima program yang besar akan meningkatkan kompleksitas pengelolaan sistem, termasuk dalam hal verifikasi data dan distribusi bantuan. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko kegagalan pembayaran akibat keterbatasan kapasitas sistem dan kesalahan administratif (Peters et al., 2022). Selanjutnya jumlah penerima insentif juga menjadi faktor penting yang memengaruhi tingkat kegagalan pembayaran. Semakin banyak jumlah penerima insentif, semakin besar volume transaksi yang harus diproses, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya gangguan teknis maupun kesalahan sistem (Gelb & Diofasi, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1:** Jumlah penerima program Kartu Prakerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kegagalan pembayaran Insentif Mencari Kerja (IMK).
- H2:** Jumlah penerima Insentif Mencari Kerja (IMK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kegagalan pembayaran Insentif Mencari Kerja (IMK).
- H3:** Jumlah penerima program dan jumlah penerima Insentif Mencari Kerja (IMK) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kegagalan pembayaran Insentif Mencari Kerja (IMK)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hubungan kausal antara variabel independen dan variabel dependen secara objektif dan terukur. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran empiris mengenai pengaruh jumlah penerima program dan jumlah penerima insentif terhadap kegagalan pembayaran insentif melalui analisis statistik (Creswell, 2018). Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan pengujian hipotesis secara sistematis dan menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasi.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen, yaitu jumlah penerima program dan jumlah penerima insentif, memengaruhi variabel dependen berupa kegagalan pembayaran insentif. Menurut Hair

et al. (2019), regresi linear berganda merupakan metode analisis yang efektif untuk menguji hubungan antara lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen serta mengukur kekuatan pengaruh masing-masing variabel.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber resmi terkait Program Kartu Prakerja dengan periode pengamatan tahun 2020 hingga 2024. Penggunaan data sekunder dalam penelitian kuantitatif dinilai efisien karena data telah tersedia dan dapat digunakan untuk menganalisis fenomena secara longitudinal (Sugiyono, 2022). Bahkan, data sekunder juga memungkinkan peneliti untuk melihat pola dan tren yang terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan dalam suatu penelitian dan memiliki variasi nilai yang dapat diukur (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan terdiri dari variabel independen dan variabel dependen.

Variabel independen (variabel bebas) merupakan variabel yang memengaruhi atau menjadi penyebab perubahan pada variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independen terdiri dari:

1. **Jumlah penerima program (X1)**, yaitu jumlah individu yang terdaftar dan mengikuti Program Kartu Prakerja dalam periode tertentu. Variabel ini mencerminkan skala program yang dijalankan oleh pemerintah.
2. **Jumlah penerima insentif (X2)**, yaitu jumlah peserta yang berhasil menerima insentif setelah mengikuti program. Variabel ini mencerminkan volume distribusi bantuan yang dilakukan dalam program tersebut.

Sementara itu, variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah:

Kegagalan pembayaran (Y), yaitu kondisi di mana insentif tidak dapat disalurkan kepada peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Variabel ini menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas implementasi program.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Tahapan pertama adalah uji asumsi klasik yang bertujuan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi asumsi dasar dalam analisis statistik. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Menurut Ghazali (2018), pemenuhan asumsi klasik merupakan syarat penting agar model regresi dapat menghasilkan estimasi yang tidak bias dan efisien.

Setelah model memenuhi asumsi klasik, dilakukan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh simultan maupun parsial antara variabel independen dan variabel dependen. Uji parsial (uji t) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Sementara itu, uji simultan (uji F) digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Hair et al., 2019). Selanjutnya, koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R^2 yang semakin tinggi menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan hubungan antar variabel (Gujarati & Porter, 2009).

Dengan menggunakan rangkaian teknik analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang akurat dan dapat menjelaskan secara komprehensif pengaruh jumlah penerima program dan jumlah penerima insentif terhadap kegagalan pembayaran insentif pada Program Kartu Prakerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan analisis regresi linear berganda, diperoleh hasil uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F) untuk mengetahui pengaruh variabel jumlah penerima program dan jumlah penerima insentif terhadap kegagalan pembayaran Insentif Mencari Kerja (IMK).

Tabel 3. Uji Hipotesis

Coefficients ^a					
Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients		
Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	-18.099	2.453		-7.377	.000
Penerima_Program	1.852	.423	.708	4.381	.000
Penerima_IMK	.167	.364	.074	.439	.047

Variabel	t-hitung	Sig.	Keterangan
Penerima Program (X1)	4.381	0.000	Signifikan
Penerima IMK (X2)	0.439	0.047	Signifikan

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 3. Uji Hipotesis diatas, diketahui bahwa variabel jumlah penerima program (X1) memiliki nilai t-hitung sebesar 4.381 dengan tingkat signifikansi 0.000, yang lebih kecil dari $\alpha = 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel jumlah penerima program berpengaruh positif dan signifikan terhadap kegagalan pembayaran IMK. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) dapat diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah peserta program akan meningkatkan risiko kegagalan pembayaran akibat meningkatnya kompleksitas pengelolaan sistem. Selanjutnya, variabel jumlah penerima IMK (X2) memiliki nilai t-hitung sebesar 0.439 dengan tingkat signifikansi 0.047, yang juga lebih kecil dari $\alpha = 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel jumlah penerima insentif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kegagalan pembayaran IMK. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) juga dapat diterima. Meskipun demikian, pengaruh variabel ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penerima program.

Tabel 4. Uji Anova ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	230.746	2	115.373	50.093	.000 ^b
	Residual	154.312	67	2.303		
	Total	385.058	69			

a. Dependent Variable: Kegagalan_Program

b. Predictors: (Constant), Penyaluran_IMK

Model	F-hitung	Sig.	Keterangan
Regresi	50.093	0.000	Signifikan

Sumber: Data diolah (20205)

Berdasarkan Tabel 4, diperoleh nilai F-hitung sebesar 50.093 dengan tingkat signifikansi 0.000, yang lebih kecil dari $\alpha = 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel jumlah penerima program dan jumlah penerima IMK secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kegagalan pembayaran IMK. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) dapat diterima.

Koefisien Determinasi (R²)

Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,599 menunjukkan bahwa sekitar 59,9% variasi kegagalan pembayaran IMK dapat dijelaskan oleh variabel jumlah penerima program dan jumlah penerima IMK. Sementara itu, sisanya sebesar 40,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penerima program memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap kegagalan pembayaran IMK. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kompleksitas pengelolaan program seiring dengan bertambahnya jumlah peserta, terutama dalam hal validasi data dan distribusi bantuan. Di sisi lain, jumlah penerima insentif juga berpengaruh signifikan terhadap kegagalan pembayaran, meskipun dengan tingkat pengaruh yang lebih rendah. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya volume transaksi dalam sistem pembayaran, yang berpotensi menimbulkan kendala teknis maupun administratif. Secara simultan, kedua variabel tersebut terbukti memiliki pengaruh yang kuat terhadap kegagalan pembayaran IMK. Hal ini menunjukkan bahwa skala program dan volume distribusi insentif merupakan faktor utama yang menentukan efektivitas implementasi Program Kartu Prakerja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah penerima program dan jumlah penerima insentif terhadap kegagalan pembayaran insentif pada Program Kartu Prakerja di Indonesia periode 2020–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah penerima program memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kegagalan pembayaran insentif. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar jumlah peserta dalam program, maka semakin tinggi pula tingkat kompleksitas dalam pengelolaan data dan sistem distribusi, yang pada akhirnya meningkatkan potensi terjadinya kegagalan pembayaran. Selain itu, variabel jumlah penerima insentif juga terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kegagalan pembayaran insentif. Peningkatan jumlah penerima insentif berimplikasi pada meningkatnya volume transaksi dalam sistem pembayaran, sehingga berpotensi menimbulkan kendala teknis maupun administratif dalam proses penyaluran bantuan.

Secara simultan, kedua variabel independen, yaitu jumlah penerima program dan jumlah penerima insentif, terbukti berpengaruh signifikan terhadap kegagalan pembayaran insentif. Hal ini menunjukkan bahwa skala program dan besarnya distribusi bantuan menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas implementasi Program

Kartu Prakerja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin besar skala program dan jumlah penerima manfaat, maka semakin tinggi pula risiko kegagalan pembayaran insentif, terutama apabila tidak didukung oleh sistem administrasi dan teknologi yang memadai.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Kartu Prakerja, khususnya dalam meminimalkan kegagalan pembayaran insentif:

1. Peningkatan Kapasitas Sistem Digital
Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas dan keandalan sistem teknologi informasi yang digunakan dalam penyaluran insentif. Hal ini penting untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penerima program serta volume transaksi yang tinggi, sehingga dapat meminimalkan terjadinya gangguan sistem.
2. Perbaikan Manajemen Data Peserta
Diperlukan penguatan dalam pengelolaan dan validasi data peserta agar lebih akurat dan terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesalahan administratif yang dapat menyebabkan kegagalan pembayaran insentif.
3. Penguatan Koordinasi Antar Lembaga
Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antar instansi yang terlibat dalam pelaksanaan program, termasuk lembaga pelatihan, platform digital, dan penyedia layanan pembayaran. Koordinasi yang baik akan mendukung kelancaran distribusi insentif.
4. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi
Diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mendeteksi dan mengatasi permasalahan dalam proses pembayaran secara cepat dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, A. J. G., & Koettl, J. (2015). Active labor market programs: Employment gain or fiscal drain? *IZA Journal of Labor Economics*, 4(1), 1–36.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Gelb, A., & Diofasi, A. (2020). Digital identification and the delivery of public services. *Center for Global Development*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2023). *Program Kartu Prakerja*.
- Mergel, I., Edelman, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4).
- Mulyadi. (2016). *Sistem akuntansi*. Salemba Empat.

- OECD. (2023). *Digital government review: Enhancing public service delivery*. OECD Publishing.
- Peters, B. G., Pierre, J., & Randma-Liiv, T. (2022). Global public administration in the context of COVID-19. *Public Organization Review*, 22, 1–16.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation*. University of California Press.
- Setianto, & Kurniawan, P. A. (2020, February 5). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2019. *BPS*.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Taufiq, I., & Akhmadi, M. H. (2022a). The effectiveness of the pre-employment card program on increasing recipient productivity. *Keberlanjutan : Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi* , 7(1), 37–50. <https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v7i1.y2022.p37-50>
- World Bank. (2022). *Social protection and jobs responses to COVID-19: A real-time review*. World Bank.

